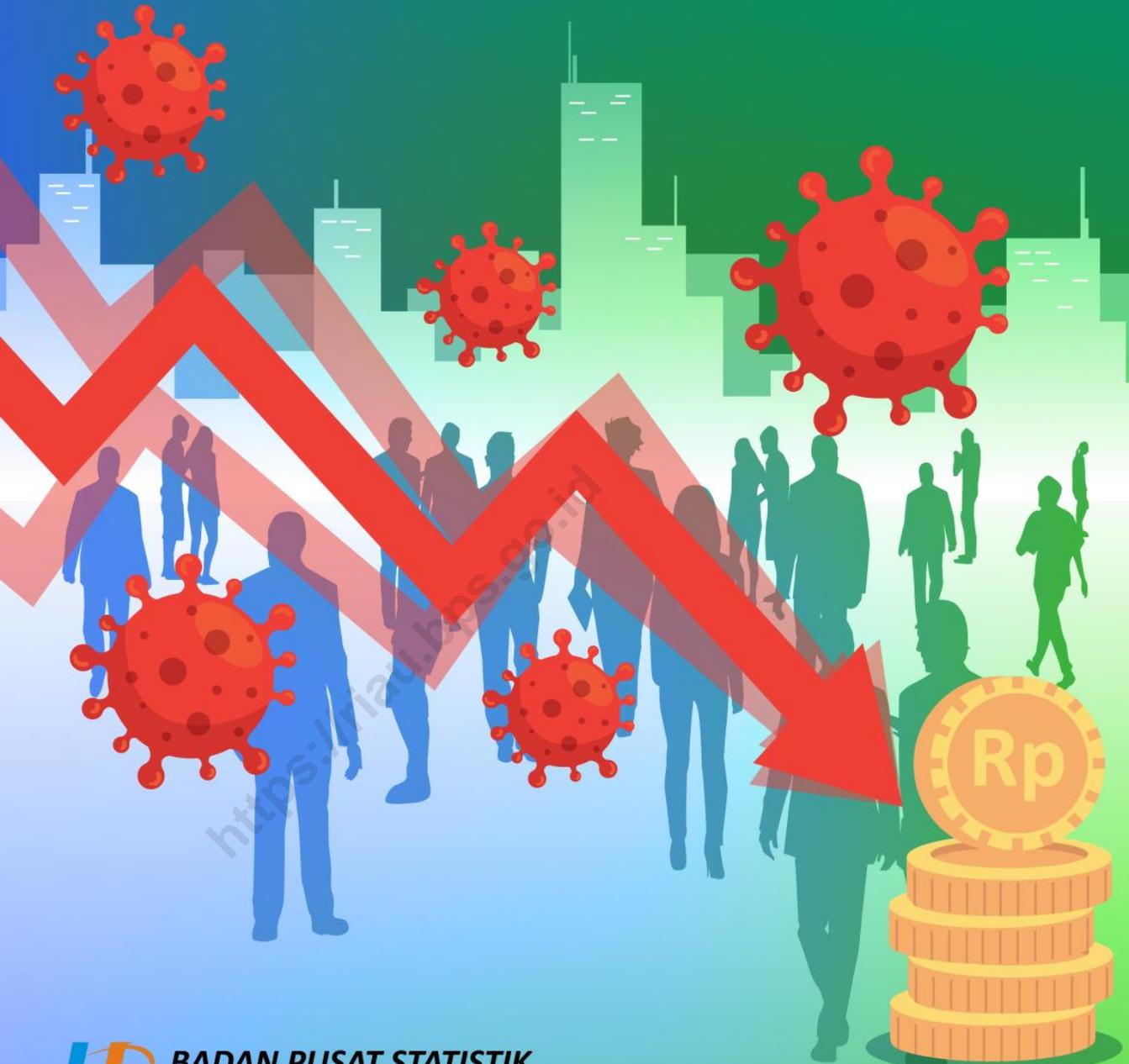


OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL RIAU 2020

**“Fundamental Perekonomian dan Kondisi Sosial
di Tengah Ketidakpastian Pandemi COVID-19”**



OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL RIAU 2020

“Fundamental Perekonomian dan Kondisi Sosial
di Tengah Ketidakpastian Pandemi COVID-19”



OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL RIAU 2020 “Fundamental Perekonomian dan Kondisi Sosial di Tengah Ketidakpastian Pandemi COVID-19”

ISBN: 978-602-5665-44-8

No. Publikasi: 14000.2105

Katalog: 3102044.14

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: x+41 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pencetak:

CV M.N. Grafika

Sumber Ilustrasi:

freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL RIAU 2020

**“Fundamental Perekonomian dan Kondisi Sosial
di Tengah Ketidakpastian Pandemi COVID-19”**

Pengarah:

Misfaruddin

Editor:

Urip Widiyantoro

Fitri Hariyanti

Penulis:

Fitri Hariyanti

Oldestia Vianny

Bekti Indasari

Layout:

Bekti Indasari

<https://riaupress.go.id>

KATA PENGANTAR



Publikasi *OVERVIEW PEREKONOMIAN DAN SOSIAL RIAU 2020* “**Fundamental Perekonomian dan Kondisi Sosial di Tengah Ketidakpastian Pandemi COVID-19**” ini berisi analisis ringkas yang mengkaji kondisi perekonomian dan sosial Riau di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Aspek ekonomi yang dianalisis dalam buku ini meliputi Luas Panen dan Produksi Padi, Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi, Neraca Perdagangan (Ekspor-Impor), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedangkan aspek sosial yang dianalisis adalah Kependudukan, Ketenagakerjaan, Indek Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Kemiskinan.

Buku ini merupakan salah satu buku dari serial Analisis Isu Terkini BPS Provinsi Riau tahun 2021 yang fokus pembahasannya mengenai keadaan perekonomian dan kondisi sosial Riau di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Dengan mengetahui kondisi riil, diharapkan pemangku kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul yang terkait dengan ekonomi dan sosial selama pandemi COVID-19.

Publikasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan analisis di masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian publikasi ini.

Pekanbaru, Maret 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau



Misfaruddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
<i>HIGHLIGHT</i>	1
LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI.....	3
NILAI TUKAR PETANI (NTP).....	4
INFLASI	5
EKSPOR-IMPOR	6
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	7
KEPENDUDUKAN	10
TENAGA KERJA	13
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM).....	15
KEMISKINAN.....	17
PENJELASAN TEKNIS.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkembangan Produksi Padi (GKG) di Riau (ribu ton), 2019-2020.....	3
Gambar 2.	Perkembangan Luas Panen Padi di Riau (ribu ha), 2019-2020	4
Gambar 3.	Nilai Tukar Petani Provinsi Riau.....	5
Gambar 4.	Tingkat Inflasi Bulanan di Provinsi Riau (mtom, %), 2020	6
Gambar 5.	Ekspor Impor Riau (miliar US\$), Semester I 2018-Semester II 2020.....	6
Gambar 6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Provinsi Riau (persen), 2020.....	8
Gambar 7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2011-2020	8
Gambar 8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020	9
Gambar 9.	Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2020	9
Gambar 10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Komponen Pengeluaran (persen), 2020.....	10
Gambar 11.	Kontribusi Komponen Pengeluaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2020	10
Gambar 12.	Jumlah Penduduk (juta jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau (persen), 1961-2020.....	11
Gambar 13.	Komposisi Penduduk Provinsi Riau, 2020.....	12
Gambar 14.	Rasio Ketergantungan Provinsi Riau (persen), 1990-2020	12
Gambar 15.	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2020	13
Gambar 16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau (persen), 2019 & 2020 (Agustus)	14
Gambar 17.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau (persen), 2019 & 2020 (Agustus)	15
Gambar 18.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau, 2016-2020.....	15
Gambar 19.	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Riau (tahun), 2016-2020.....	16
Gambar 20.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Riau (tahun), 2016-2020.....	16
Gambar 21.	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Provinsi Riau (000 rupiah), 2016-2020	17
Gambar 22.	Jumlah (jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau, September 2012- September 2020.....	18

Gambar 23. Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan-Perdesaan di Provinsi Riau, September 2017 – September 2020.....	19
Gambar 24. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Provinsi Riau, September 2017 – September 2020	19
Gambar 25. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Provinsi Riau, September 2017 – September 2020	20
Gambar 26. Gini Rasio Menurut Daerah di Provinsi Riau, September 2019 – September 2020	20

<https://riau.bps.go.id>

HIGHLIGHT

- Riau terus berupaya untuk meningkatkan produksi padi setiap tahunnya. Produksi padi di Riau sepanjang Januari hingga Desember 2020 adalah sebanyak 243,69 ribu ton GKG, atau mengalami peningkatan sekitar 12,81 ribu ton (5,55 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 230,87 ribu ton GKG.
- Di tahun 2020, sektor pertanian memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Riau. Selama 12 bulan di tahun 2020, NTP Riau tetap terjaga di atas nilai 100. Secara umum NTP Riau terus mengalami peningkatan dengan puncak NTP tertinggi adalah pada bulan Desember 2020 yaitu sebesar 130,34.
- Sepanjang tahun 2020, inflasi di Riau tercatat cukup di level 2,42 persen yang mengindikasikan adanya penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan sebagai dampak negatif pandemi COVID-19.
- Neraca perdagangan Riau menunjukkan nilai yang surplus di periode Januari-Desember 2020 dengan penyumbang ekspor terbesar adalah sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan sebesar 13,62 persen (yoy)
- Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi di Riau mengalami kontraksi sebesar 1,12 persen. Angka ini tercatat sebagai pertumbuhan terendah selama satu dekade terakhir, bahkan sejak tahun 2009. Jika dihitung tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Riau hanya mengalami penurunan tipis sebesar 0,20 persen.
- Penduduk Riau terus mengalami peningkatan sejak sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961. Jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2020 sebanyak 6,39 juta jiwa,
- Jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja di Provinsi Riau periode Agustus 2020 mencapai 3,23 juta orang. Sedangkan TPAK Provinsi Riau pada periode Agustus 2020 tercatat menurun 0,70 poin persen dibandingkan Agustus 2019 sebagai dampak lesunya perekonomian Provinsi Riau di tengah pandemi COVID-19.
- Sejalan dengan apa yang diperkirakan United Nations Development Programme (UNDP) tentang dampak COVID-19 terhadap pembangunan manusia, maka pada tahun 2020 IPM Riau tercatat sebesar 72,71 atau turun 0,29 poin (0,40 persen) dibanding tahun sebelumnya. Penurunan disebabkan oleh berkurangnya nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan dibanding tahun sebelumnya.

- Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat pendapatan dan meningkatnya kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau pada September 2020 sebesar 7,04 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin persen jika dibandingkan dengan September 2019.

<https://riau.bps.go.id>

LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI

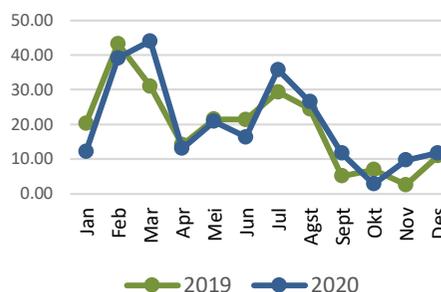
Berbagai aspek kehidupan masyarakat terkena dampak dari Pandemi COVID-19. Tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga sangat berpotensi mengganggu ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan, apalagi belum diketahui sampai kapan pandemi ini akan berakhir.

Menurut Organisasi Pangan Sedunia (FAO), potensi krisis pangan di masa pandemi akan mengancam dunia, termasuk Indonesia. Menjaga ketahanan pangan di masa pandemi adalah suatu keharusan dan menjadi satu program prioritas pemerintah Indonesia.

Pangan identik dengan beras, ini disebabkan karena hampir semua atau sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi beras. Oleh karena itu ketahanan pangan bagi Indonesia berkaitan erat dengan kecukupan penyediaan beras.

Padi sebagai tanaman penghasil beras menjadi komoditas yang sangat penting bagi Indonesia, selain sebagai penghasil bahan pangan pokok, komoditas padi juga merupakan sumber penghasilan utama dari jutaan petani. Tidak untuk Riau, salah satu sumber penghasilan utama masyarakat Riau adalah subsektor perkebunan karena

hampir 33 persen masyarakatnya bekerja pada lapangan usaha ini.

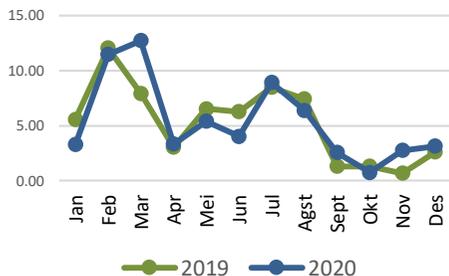


Gambar 1 Perkembangan Produksi Padi (GKG) di Riau (ribu ton), 2019-2020

Walaupun tidak menjadi sumber penghasilan utama tetapi Riau tetap berupaya untuk meningkatkan produksi padi setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya produksi padi pada tahun 2020. Produksi padi di Riau sepanjang Januari hingga Desember 2020 adalah sebanyak 243,69 ribu ton GKG, atau mengalami peningkatan sekitar 12,81 ribu ton (5,55 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 230,87 ribu ton GKG. Peningkatan produksi terjadi karena terjadi peningkatan luas panen pada sub round tiga yang disebabkan adanya percepatan tanam.

Tiga kabupaten/kota dengan total potensi produksi padi (Gabah Kering Giling/GKG) tertinggi pada 2020 adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi

terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru.



Gambar 2. Perkembangan Luas Panen Padi di Riau (ribu ha), 2019-2020

Peningkatan produksi padi tidak terlepas dari besarnya luas panen padi. Berdasarkan hasil Survei KSA, terjadi pergeseran puncak panen padi pada 2020 dibandingkan 2019. Puncak panen padi pada 2020 terjadi pada bulan Maret, sementara puncak panen pada 2019 terjadi pada bulan Februari.

Sepanjang Januari hingga Desember 2020, realisasi panen padi sebesar 64,73 ribu hektar atau mengalami kenaikan sebesar 4,59 ribu hektar (2,52 persen) dibandingkan 2019 yang sebesar 63,14 ribu hektar. Luas panen tertinggi pada 2020 terjadi pada Maret, yaitu sebesar 12,71 ribu hektar, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan oktober, yaitu sebesar 0,75 ribu hektar.

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Pandemi COVID-19 berdampak terhadap sektor dunia usaha. Tidak sedikit sektor dunia usaha yang

terpuruk. Namun ternyata masih ada jenis usaha yang mampu bertahan di tengah pandemi. Salah satunya adalah usaha pada sektor pertanian.

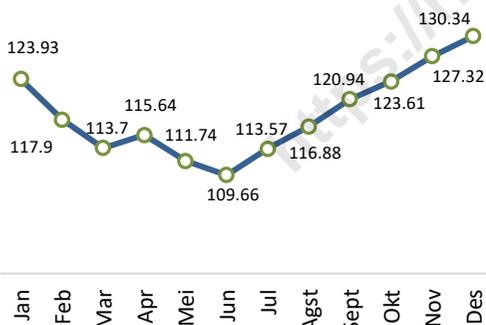
Di tahun 2020, sektor pertanian memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Riau. Sektor pertanian berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana selama tahun 2020 tumbuh 4,35 persen, terutama ditopang oleh kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan. Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Riau di tahun 2020 mencapai 26,83 persen, menduduki peringkat kedua setelah lapangan usaha Industri Pengolahan yang memiliki peranan 28,27 persen.

Tidak hanya dalam PDRB yang mengalami pertumbuhan positif, tapi juga mengalami peningkatan dalam ekspor. Selama rentang waktu Januari-Desember 2020, ekspor nonmigas dari industri pengolahan hasil pertanian yang didominasi oleh lemak & minyak hewan/nabati (CPO dan turunannya) mencapai USD 8,32 miliar atau sebesar 60,22 persen dari total nilai ekspor Riau yang mencapai USD 13,81 miliar.

Bertahannya sektor ini di saat pandemi berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan petani yang ditunjukkan melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Semakin tinggi nilai NTP, semakin baik

daya beli petani terhadap pemenuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian, dan berarti tingkat kehidupan petani relatif lebih sejahtera.

Sepanjang tahun 2020, NTP Riau tetap terjaga di atas nilai 100. Meskipun terjadi fluktuasi atau naik turun tetapi secara umum NTP Riau terus mengalami peningkatan dengan puncak NTP tertinggi adalah pada bulan Desember 2020 yaitu sebesar 130,34. Tingginya NTP lebih disebabkan karena indeks harga yang diterima petani menjadi mengalami kenaikan akibat dari naiknya harga pada sejumlah komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan kelapa.



Gambar 3. Nilai Tukar Petani Provinsi Riau (2018=100), 2020

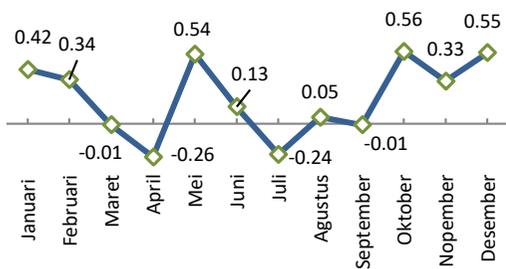
Meskipun ekonomi dunia juga terdampak COVID-19 tetapi hal ini tidak menyurutkan permintaan hasil olahan kelapa sawit (*Crude Palm Oil* atau CPO). Permintaan CPO dari negara-negara pengimpor tetap tinggi meskipun sempat terjadi penurunan permintaan

tetapi tidak signifikan. Selain itu permintaan dalam negeri akan CPO sebagai bahan dasar biodiesel sebagai akibat dari program pemerintah B30, menjadikan permintaan CPO tetap tinggi.

INFLASI

Sepanjang tahun 2020, inflasi bulanan tercatat pada level yang masih rendah dan inflasi di tahun 2020 tercatat sebesar 2,42 persen. Memasuki tahun 2021 inflasi masih di kisaran rendah. Hingga bulan Januari 2021 inflasi tercatat 0,08 persen (*month to month/mtm*) atau 2,67 persen (*year on year/yoy*).

Rendahnya tingkat inflasi di masa pandemi COVID-19 mengindikasikan adanya penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dalam PDRB Riau di tahun 2020 yang mengalami kontraksi (turun) sebesar 2,11 persen. Namun, ketergantungan Riau yang sangat tinggi terhadap pasokan dari luar daerah terutama komoditas yang termasuk masuk komponen bergejolak (*volatile*) seperti cabai, daging ayam ras, dan bawang merah, terus menjadi perhatian pemerintah (infopublik.id).



Gambar 4. Tingkat Inflasi Bulanan di Provinsi Riau (mtm,%), 2020

Permintaan terhadap barang makin melemah setelah pemerintah memberlakukan *work from home* (WFH) mulai April 2020 lalu. Hal itu secara langsung berdampak pada turunnya permintaan yang diikuti dengan merosotnya suplai barang. Meskipun pemerintah mulai melakukan relaksasi terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak awal Juni 2020 lalu, kekhawatiran terhadap wabah virus corona yang masih sangat besar tak bisa mendorong konsumsi. Terutama, kelas menengah yang menjadi pendorong utama konsumsi rumah tangga.

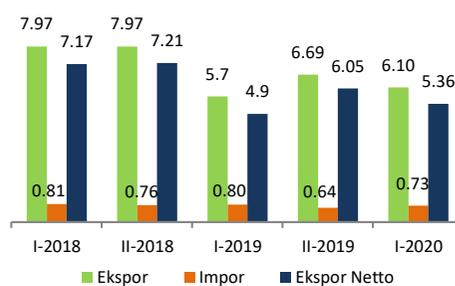
Aktivitas ekonomi masyarakat kembali bergerak pada triwulan III 2020. Hampir seluruh sektor ekonomi sudah dibuka kembali melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Walaupun demikian, aktivitas ekonomi belum kembali pada level sebelum merebaknya pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, tugas pemerintah ke depan salah satunya yakni dengan meningkatkan kembali daya beli

masyarakat. Hal itu agar tingkat konsumen kembali naik dan ekonomi lokal setidaknya kembali bergairah.

EKSPOR-IMPOR

Neraca perdagangan Provinsi Riau menunjukkan nilai yang surplus pada periode Januari-Desember 2020 ini. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh penurunan impor tetapi ternyata kinerja ekspor juga meningkat. BPS mencatat nilai ekspor pada periode Januari-Desember 2020 tercatat USD 13,81 miliar, sementara impor tercatat sebesar USD 1,32 miliar sehingga neraca perdagangan menunjukkan surplus USD 12,50 miliar. Nilai surplus ini meningkat 14,2 persen dibandingkan tahun 2019. Namun ekonom Center of Reforms on Economics (Core) yaitu Yusuf Rendy Manilet berpendapat bahwa surplus neraca dagang ini relatif tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi karena secara y-on-y ditopang penurunan nilai impor yang tajam.



Gambar 5. Ekspor Impor Riau (miliar US\$), Semester I 2018-Semester II 2020

Penyumbang ekspor terbesar pada periode Januari-Desember 2020 yaitu sektor industri yang mengalami peningkatan sebesar 13,62 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Sementara itu, ekspor sektor migas mengalami penurunan sebesar 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Adapun pangsa tujuan ekspor masih didominasi Tiongkok (17,49%), diikuti India (13,17%) dan Pakistan (5,59%). Secara umum, kinerja ekspor Riau di tengah pandemi ini justru lebih baik dengan tumbuh 11,31 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Selain kinerja ekspor yang membaik, penurunan impor di periode Januari-Desember 2020 ini turut meningkatkan surplus neraca perdagangan. Namun penurunan impor pada periode Januari-Desember 2020 hingga negatif 8,35 persen (yoy) juga perlu diwaspadai. Penurunan impor tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Apabila dilihat menurut golongan penggunaan barang, komoditas impor yang mengalami penurunan paling besar adalah barang konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 22,37%. Namun perannya dalam impor Riau relatif kurang signifikan. Penurunan impor barang konsumsi dapat menunjukkan keberhasilan program peningkatan konsumsi barang produksi dalam negeri, di tengah penurunan permintaan

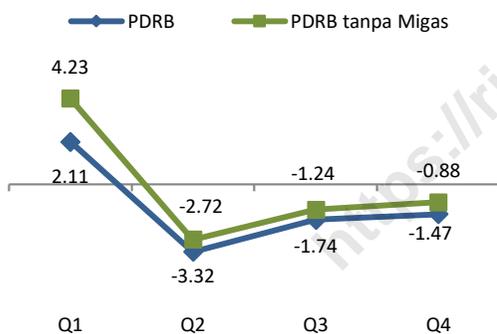
domestik akibat pandemi. Namun, ada kemungkinan ini adalah sinyal bahwa masyarakat kelas menengah ke atas cenderung menunda belanja dan memperbanyak simpanan.

Adapun kontribusi impor bahan baku/penolong sebesar 82,28 persen dari total impor Riau. Pada periode Januari-Desember 2020 impor bahan baku/penolong mengalami penurunan sebesar 9,68 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy). Penurunan impor bahan baku menunjukkan kapasitas produksi yang belum membaik. Hal ini merefleksikan permintaan barang masih lemah. Negara pemasok barang impor masih didominasi Tiongkok (17,53%), diikuti Kanada (13,28%) dan Malaysia (8,88%).

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Memasuki awal tahun 2020, COVID-19 yang merupakan varian virus baru ditemukan di beberapa negara. Penyebaran virus tersebut tentunya berdampak pada perekonomian suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Namun demikian, dampaknya baru dirasakan pada triwulan II tahun 2020 setelah diumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Pada bulan Januari dan Februari perekonomian Indonesia masih relatif berjalan normal.

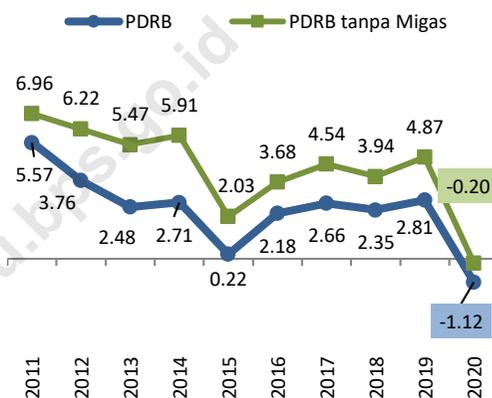
Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi di Riau mengalami kontraksi sebesar 1,12 persen. Akan tetapi, pada triwulan I-2020 ekonomi Riau masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,11 persen. Angka tersebut sedikit melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,89 persen. Pada triwulan II hingga triwulan IV pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau berturut-turut mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19. Meski demikian, pada triwulan III dan IV ekonomi Riau terus menunjukkan arah perbaikan.



Gambar 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Provinsi Riau (persen), 2020

Meski perekonomian Riau menunjukkan perbaikan pada triwulan III dan IV, namun secara tahunan ekonomi Riau turun 1,12 persen. Angka ini tercatat sebagai pertumbuhan terendah selama satu dekade terakhir, bahkan sejak tahun 2009. Jika dihitung tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Riau mengalami penurunan yang tipis yaitu sebesar 0,20 persen. Tingginya

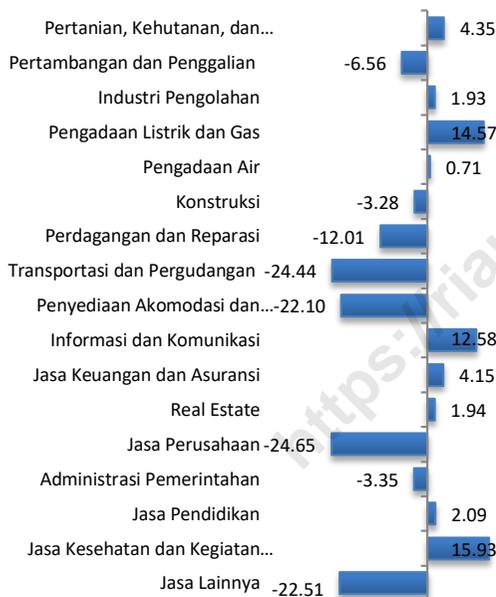
peningkatan ekspor nonmigas di Provinsi Riau selama tahun 2020 telah menahan kontraksi ekonomi Riau agar tidak lebih dalam lagi. Bahkan dari seluruh komponen pengeluaran dalam perekonomian Riau, Ekspor merupakan satu-satunya komponen yang tumbuh. Sementara komponen pengeluaran lainnya mengalami penurunan karena terdampak pandemi COVID-19.



Gambar 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2011-2020

Nilai PDRB Provinsi Riau atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 729,17 triliun rupiah. Secara nominal, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 31,40 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang nilainya sebesar 760,57 triliun rupiah. Begitupun jika ditinjau berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan dari 490,02 triliun rupiah menjadi 495,60 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2020 mengalami penurunan

jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini dikarenakan menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha. Sedangkan penurunan nilai PDRB atas dasar harga berlaku selain dipengaruhi turunnya produksi barang dan jasa pada beberapa lapangan usaha, juga salah satunya disebabkan oleh turunnya harga minyak mentah Indonesia, termasuk di Riau, sebagai salah satu komoditas utama dalam ekonomi Riau.



Gambar 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020

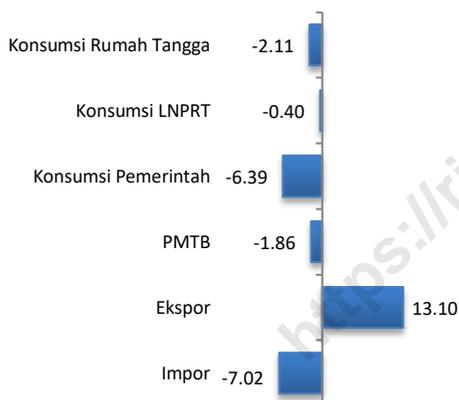
Sepanjang tahun 2020, pertumbuhan ekonomi pada kategori Jasa Perusahaan mengalami kontraksi paling dalam yaitu sebesar 24,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kegiatan persewaan alat pesta dan sejenisnya serta kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Convention,*

and Exhibition) mengalami penurunan akibat penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, kegiatan biro perjalanan haji dan umrah juga terhenti akibat adanya penghentian kegiatan ibadah haji dari Indonesia dan serta pembatasan kegiatan umrah oleh pemerintah Arab Saudi. Sedangkan untuk lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93 persen. Kenaikan tersebut disebabkan karena terjadi peningkatan aktivitas di fasilitas kesehatan serta peningkatan honor petugas medis selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, banyak permintaan uji *rapid* antibodi/*swab* antigen dan PCR untuk mendapatkan surat bebas COVID-19 sebagai syarat perjalanan antardaerah.



Gambar 9. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2020

Besarnya ketergantungan Provinsi Riau terhadap kemampuan produksi dari setiap lapangan usaha digambarkan melalui struktur ekonomi. Sepanjang tahun 2020 baik secara triwulanan dan tahunan, struktur perekonomian Riau didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan dan Reparasi; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Provinsi Riau.

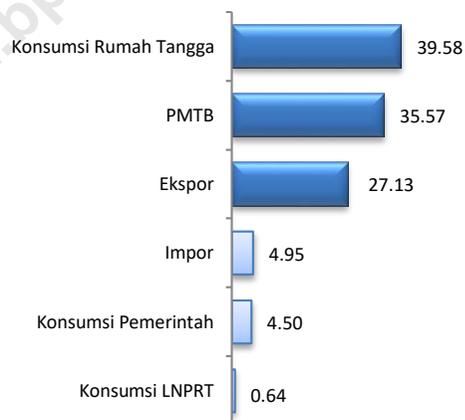


Gambar 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Menurut Komponen Pengeluaran (persen), 2020

Ditinjau dari sisi pengeluaran, terjadi penurunan pada hampir seluruh komponen kecuali Ekspor yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 13,10 persen. Pertumbuhan ini akibat meningkatnya permintaan luar negeri terhadap beberapa komoditas utama Riau seperti CPO dan turunannya. Sedangkan, kontraksi paling besar terjadi pada komponen Impor sebesar 7,02 persen. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan beberapa

komoditas impor yang termasuk dalam barang konsumsi dan bahan baku/penolong akibat kelesuan ekonomi di masa pandemi.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen pengeluaran yang dominan dalam perekonomian Provinsi Riau dengan pangsa sebesar 39,58 persen. Selanjutnya disusul oleh pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan kontribusi 35,57 persen. Di sisi lain, Ekspor memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian Riau juga, yaitu 27,13 persen.



Gambar 11. Kontribusi Komponen Pengeluaran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (persen), 2020

KEPENDUDUKAN

Pada 21 Januari 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data resmi jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Berdasarkan hasil tersebut tercatat jumlah penduduk Provinsi Riau pada

September 2020 sebanyak 6,39 juta jiwa. Angka ini terus mengalami peningkatan sejak sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010, terlihat adanya peningkatan sebanyak 855,72 ribu jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau selama periode 1971 hingga 2010 berada di atas 3 persen dengan rata-rata 3,57 per tahun. Sedangkan pada periode 2010 hingga 2020 sedikit mengalami perlambatan. Pada dekade terakhir ini, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau hanya sebesar 1,40 persen per tahun. Angka tersebut melambat 2,18 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010. Fenomena menarik yang ditemukan pada periode 2000-2010 adalah Riau merupakan provinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi penerima migran terbesar. Adanya pembukaan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit secara massif, akibat permintaan komoditas yang meningkat pesat, menjadi penyebab meningkatnya daya tarik migrasi penduduk ke Provinsi Riau. Selain itu, tersedianya lowongan pekerjaan dari berbagai sektor ekonomi lainnya antara lain lapangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan industri pengolahan, menjadikan Riau menjadi tujuan para pencari kerja dari luar Provinsi Riau.



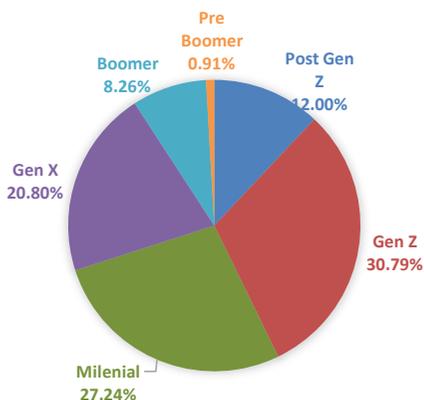
Gambar 12. Jumlah Penduduk (juta jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau (persen), 1961-2020

Jika diperhatikan pada periode 2010-2020, pola migrasi penduduk ke Provinsi Riau mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini didukung dengan fenomena penutupan dan pengalihan lokasi beberapa perusahaan besar, seperti rencana alih operasi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina. Dalam kurun waktu tersebut, perusahaan minyak ini dikabarkan telah melakukan efisiensi dengan cara perampingan jumlah karyawan maupun pemutusan hubungan kerja dengan para perusahaan subkontraktornya. Kebijakan tersebut membuat ribuan karyawan perusahaan yang terkait dengan Chevron terkena dampaknya dan kembali ke daerah asal masing-masing.

Ditinjau dari sisi usia, komposisi penduduk menjadi suatu hal yang penting. Komposisi penduduk usia produktif (14-64 tahun) yang sangat besar merupakan salah satu modal pembangunan di Provinsi Riau. Jumlah

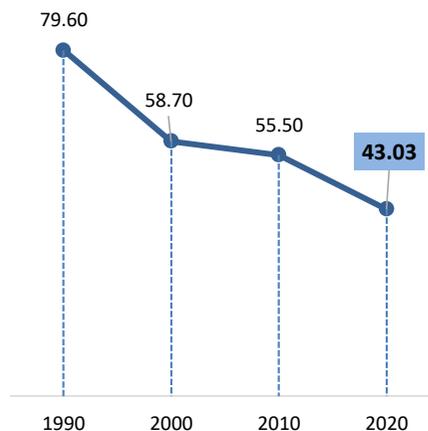
penduduk Riau tahun 2020 berdasarkan hasil SP2020 didominasi oleh Generasi Z (lahir tahun 1997-2012) dan Generasi Milenial (lahir tahun 1981-1996), dengan proporsi masing-masing sebesar 30,79 persen dan 27,24 persen. Populasi Generasi Z tercatat sebanyak 1,94 juta jiwa, sedangkan Generasi Milenial sebanyak 1,72 juta jiwa. Selanjutnya disusul oleh Generasi X (lahir tahun 1965-1980) dengan proporsi 20,80 persen atau sebanyak 1,31 juta jiwa.

Pada tahun 2020, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar 7 tahun lagi, sebagian dari Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Provinsi Riau, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Provinsi Riau.



Gambar 13. Komposisi Penduduk Provinsi Riau, 2020

Perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (usia 0-14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) digambarkan oleh rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan di Riau pada tahun 1990 mencapai 79,60 persen dan menurun menjadi 55,50 persen pada tahun 2010. Angka ini mengalami tren menurun hingga menjadi 43,03 persen pada tahun 2020. Artinya dari 100 orang penduduk produktif menanggung secara ekonomi 43 orang usia nonproduktif. Penurunan rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

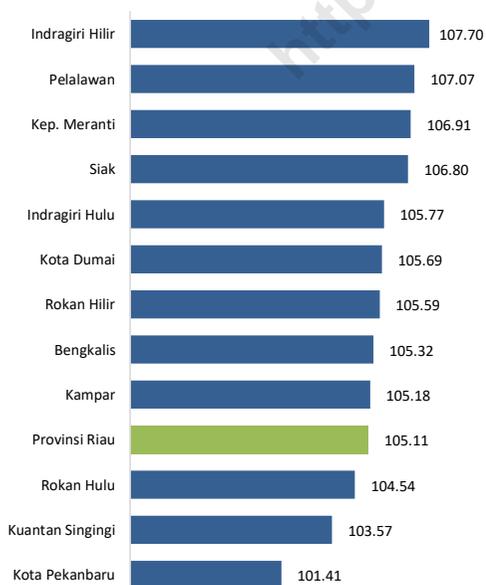


Gambar 14. Rasio Ketergantungan Provinsi Riau (persen), 1990-2020

Berdasarkan keterbandingan jenis kelamin, pada tahun 2020 proporsi penduduk laki-laki di Provinsi Riau sebesar 51,25 persen atau sebanyak 3,27

juta jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk perempuan di Provinsi Riau sebanyak 3,12 juta orang atau 48,75 persen dari penduduk Provinsi Riau. Dari kedua informasi tersebut menunjukkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Provinsi Riau sebesar 105. Hal ini berarti terdapat 105 laki-laki per 100 perempuan di Provinsi Riau. Rasio jenis kelamin bervariasi jika ditinjau menurut kelompok usia.

Rasio jenis kelamin di level Provinsi Riau sejalan dengan level nasional, dimana penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini juga berlaku sama untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.



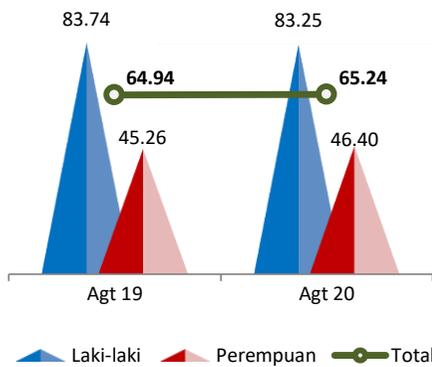
Gambar 15. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2020

Provinsi Riau memiliki luas daratan sebesar 87,02 ribu kilometer persegi, dengan jumlah penduduk penduduk sebanyak 6,39 juta jiwa maka kepadatan penduduk Provinsi Riau di tahun 2020 sekitar 73 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kota Pekanbaru menjadi wilayah terpadat di Provinsi Riau. Hal tersebut dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki luas geografi terkecil atau sebesar 0,73 persen wilayah Provinsi Riau, namun dihuni oleh 0,98 juta jiwa atau 15,38 persen penduduk Provinsi Riau. Sementara Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai mempunyai sebaran penduduk di bawah 5 persen penduduk Provinsi Riau.

TENAGA KERJA

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan secara semesteran, penduduk yang termasuk angkatan kerja di Provinsi Riau periode Agustus 2020 mencapai 3,23 juta orang. Sedangkan pada periode Agustus 2019 jumlah angkatan kerja Provinsi Riau sebanyak 3,13 juta orang. Untuk mengetahui ukuran keaktifan penduduk usia kerja dapat dilihat dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).



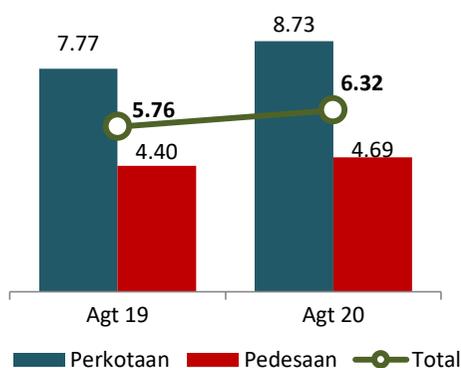
Gambar 16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Riau (persen), 2019 & 2020 (Agustus)

TPAK Provinsi Riau pada Agustus 2020 tercatat sebesar 65,24 persen, meningkat sebesar 0,30 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2019 yang besarnya 64,94 persen. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terlihat perbedaan yang signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan pada kedua periode. TPAK laki-laki berada di kisaran 83 persen ke atas, sedangkan TPAK perempuan berada di rentang 45 hingga 46 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan masih ada kesenjangan yang tinggi antara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dengan perempuan.

Jika ditelusuri lebih jauh, pada periode Agustus 2020 terlihat bahwa TPAK laki-laki justru mengalami penurunan. Hal tersebut ditengarai akibat banyaknya tenaga kerja laki-laki yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun dirumahkan selama pandemi COVID-19 lantaran adanya

pengurangan tenaga kerja. Berbanding terbalik dengan TPAK laki-laki, angka TPAK perempuan mengalami kenaikan 1,14 persen poin. Jumlah peningkatan partisipasi kerja perempuan adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang meningkat di tengah pandemi. Sementara di saat yang sama pendapatan kaum laki-laki sebagai kepala keluarga mengalami penurunan atau bahkan hilang akibat PHK.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Provinsi Riau pada Agustus 2020 mengalami kenaikan menjadi 6,32 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja di Provinsi Riau, terdapat 6 orang yang masuk kategori pengangguran. Jika ditelusuri lebih jauh, baik daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami lonjakan TPT pada periode Agustus 2020. Lonjakan ini dipicu akibat lesunya perekonomian Provinsi Riau sebagai dampak pandemi COVID-19.



Gambar 17. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau (persen), 2019 & 2020 (Agustus)

Jika ditinjau lebih jauh, kenaikan TPT pada periode Agustus 2020 di perkotaan hampir menyentuh angka 1 persen poin, lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang melumpuhkan lapangan usaha jasa-jasa yang banyak bergerak di daerah perkotaan. Sedangkan di daerah pedesaan kategori pertanian lebih mendominasi lapangan usaha. Sepanjang tahun 2020, pertanian merupakan lapangan usaha yang kebal di tengah guncangan pandemi COVID-19 dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Provinsi Riau.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 Mei 2020

telah memperkirakan bahwa pandemi COVID-19 dapat membalikkan tren pembangunan manusia untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir. Pernyataan tersebut menggunakan simulasi permodelan statistik untuk memperkirakan dampak pandemi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejalan dengan hal tersebut, pencapaian pembangunan manusia Riau juga mengalami kemunduran. IPM Riau tahun 2020 tercatat sebesar 72,71 atau turun 0,29 poin (0,40 persen) dibanding tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2016-2020 sebesar 0,52 persen per tahun.

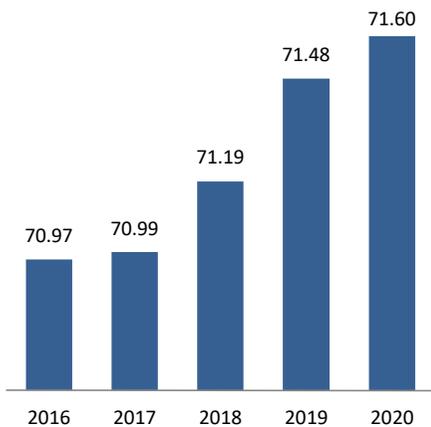


Gambar 18. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau, 2016-2020

Penurunan capaian IPM tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan, sedangkan seluruh komponen lainnya masih tumbuh positif.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir

terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Riau telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,63 tahun atau tumbuh sebesar 0,22 persen per tahun.



Gambar 19. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Riau (tahun), 2016-2020

Pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan representasi dari dimensi pengetahuan. Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,65 persen per tahun. Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Riau telah mencapai 13,20 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan mereka hingga jenjang Diploma II (tidak tamat).



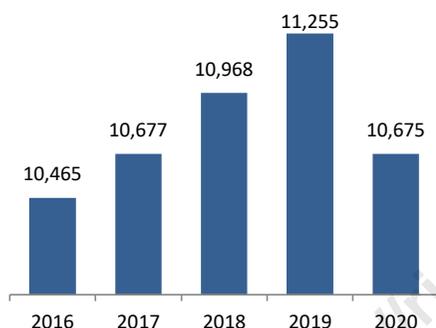
Gambar 20. Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Di Provinsi Riau (tahun), 2016-2020

Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Riau tumbuh 1,56 persen per tahun selama periode 2016 hingga 2020. Pada tahun 2020 Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Riau usia 25 tahun ke atas mencapai 9,14 tahun, atau telah menduduki jenjang pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I) namun tidak selesai.

Menurut UNICEF (Dana Anak-Anak PBB), secara global para siswa mengalami kurangnya aset rumah tangga yang diperlukan untuk menerima layanan pembelajaran digital. Hal ini terutama dialami oleh anak perempuan, tinggal di perdesaan dan merupakan keluarga miskin. Sehingga untuk mengurangi dampak lebih lanjut dari pandemi ini, kualitas pendidikan juga patut mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Sedangkan pada dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2012), pada tahun 2020

pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Riau mencapai Rp 10,68 juta per tahun, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,15 persen. Namun selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Riau meningkat sebesar 0,50 persen per tahun. Penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan kejadian kali pertama sejak IPM dihitung dengan metode baru.



Gambar 21. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Provinsi Riau (Rp 000), 2016-2020

Penurunan pengeluaran per kapita secara tidak langsung menggambarkan penurunan pendapatan per kapita penduduk Provinsi Riau. Hilangnya pendapatan secara tiba-tiba ini dapat menciptakan tekanan bagi anak-anak, terutama remaja, untuk putus sekolah bukan hanya karena biaya kuliah tetapi juga karena kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dikhawatirkan anak-anak dan remaja tersebut akan memasuki pasar tenaga kerja -sebagai akibat dari pandemi- dan mengesampingkan pendidikan mereka.

KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah, buta huruf, dan ketidaksamaan derajat antarjenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*World Bank*, 2017).

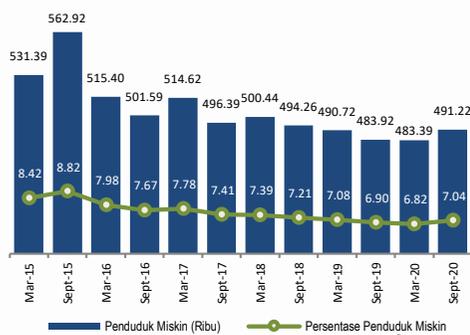
Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini mengganggu aktivitas masyarakat baik ekonomi dan sosial. Imbas dari PSBB adalah terjadinya penurunan tingkat pendapatan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan.

Dilansir dari BBC.com (10/10/2020), Bank Dunia menyebut negara-negara perlu membuat kebijakan ekonomi yang berkelanjutan untuk mengatasi ancaman kemiskinan ekstrem. Akibat pandemi virus corona, kemiskinan ekstrem diprediksi akan meningkat pada tahun ini, yakni sekitar 115 juta orang masuk ke kategori kemiskinan tersebut. Kenaikan angka kemiskinan ekstrem ini tercatat menjadi yang pertama kali terjadi sejak tahun 1998 atau dua dekade terakhir.

Indonesia termasuk negara yang mengalami peningkatan kemiskinan pada masa pandemi COVID-19. Secara umum, pada periode September 2012-September 2019, tingkat kemiskinan di Provinsi Riau cenderung mengalami

penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun terdapat kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada September 2013, Maret 2015, dan September 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin saat itu dipicu oleh bencana kebakaran hutan dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sejak pertengahan Maret 2020 hingga saat ini, Indonesia (termasuk di Provinsi Riau) dilanda pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan ekonomi terutama yang terkait dengan pergerakan orang menyebabkan pendapatan pada kegiatan ekonomi tersebut. Hal ini berimbas pada kenaikan jumlah penduduk miskin pada September 2020.

Persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Riau pada September 2020 sebesar 7,04 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan September 2019 (6,90 persen).



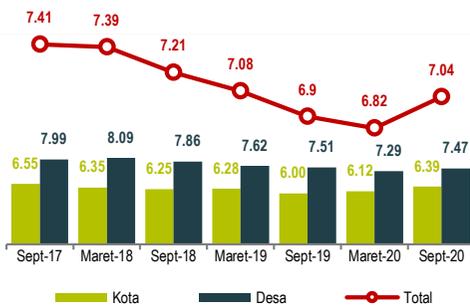
Gambar 22. Jumlah (000 jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau, September 2012-September 2020

Kemiskinan yang terjadi di Riau dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: Pertama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau pada Agustus 2020 adalah sebesar 6,32 persen, terjadi kenaikan sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,76 persen.

Kedua, terdapat 520,92 ribu orang (10,53 persen dari penduduk usia kerja) terdampak COVID-19 pada Agustus 2020, dengan rincian: 35,40 ribu penduduk menjadi Pengangguran; 10,60 ribu penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja; 28,61 ribu penduduk Sementara Tidak Bekerja; dan 446,31 ribu penduduk Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja (*Shorter Hours*).

Ketiga, Ekonomi Riau triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 turun sebesar 1,74 persen (y-on-y). Angka ini jauh menurun dibanding capaian triwulan III-2019 yang tumbuh sebesar 2,77 persen (y-on-y).

Keempat, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2020 turun sebesar 2,32 persen (y-on-y), jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 2,12 persen.

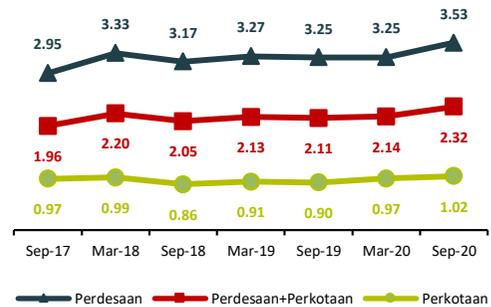


Gambar 23. Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan-Perdesaan di Provinsi Riau, September 2017 – September 2020

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, masyarakat perkotaan lebih rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan karena di perkotaan perekonomian lebih aktif dibandingkan daerah perdesaan. Pada periode September 2019 – September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 8,6 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 1,3 ribu orang. Secara persentase, kemiskinan di perkotaan naik dari 6,00 persen menjadi 6,39 persen. Sementara itu, persentase kemiskinan di perdesaan turun dari 7,51 persen menjadi 7,47 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahannya memberikan

gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.



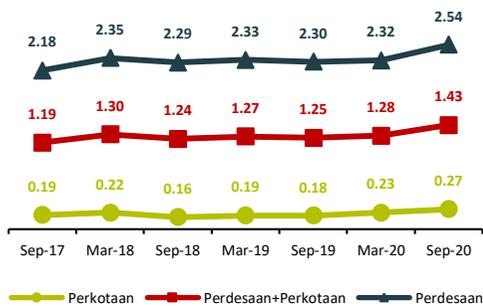
Gambar 24. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) Provinsi Riau, September 2017 – September 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya kemiskinan (P2) Provinsi Riau pada periode September 2019-September 2020 terlihat mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2019 sebesar 1,11 naik menjadi 1,32 pada September 2020. Begitu juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), mengalami peningkatan dari 0,25 pada September 2019 menjadi 0,43 pada September 2020. Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perkotaan September 2020

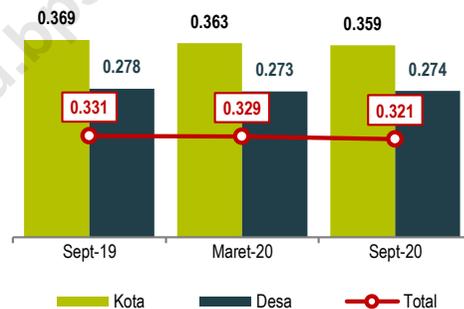
sebesar 1,02, mengalami sedikit peningkatan dari September 2019 yang tercatat 0,90. Begitu juga Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perdesaan, mengalami peningkatan dari September 2019 yang tercatat 1,25 menjadi 1,53 pada September 2020. Hal ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan maupun perdesaan cenderung menjauhi garis kemiskinan pada September 2020

Jika dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), di daerah perkotaan, terlihat peningkatan dari 0,18 pada September 2019 menjadi 0,27 pada September 2020. Begitu juga di daerah perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dari 0,29 pada September 2019 menjadi 0,54 pada September 2020. Dengan demikian, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan relatif mengalami peningkatan di periode tersebut.



Gambar 25. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) Provinsi Riau, September 2017 – September 2020

Perbedaan pendapatan masyarakat dapat menimbulkan ketimpangan. Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Angka Gini Rasio yang juga sering disebut Indeks Gini atau lengkapnya *Gini Concentration Ratio*. Indeks Gini/Gini Rasio merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis.



Gambar 26. Gini Rasio Menurut Daerah di Provinsi Riau, September 2019 – September 2020

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai Gini Rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Nilai Gini Rasio di Provinsi Riau justru terlihat menurun dari tahun 2019 hingga 2020. Pada September 2019, Gini Rasio Provinsi Riau sebesar 0,331. Secara perlahan, angka tersebut turun hingga September 2020 berada pada posisi 0,321. Hal ini menandakan bahwa terjadinya penurunan pendapatan yang terjadi



pada masa pandemi COVID-19 justru dapat menurunkan kesenjangan pendapatan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, dalam periode September 2019 – September 2020, Gini Rasio di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2020

adalah sebesar 0,359, sedangkan Gini Rasio daerah perdesaan sebesar 0,274. Jika dibandingkan dengan Maret 2020, Gini Rasio perkotaan menurun dari 0,363 menjadi 0,359. Sementara itu, Gini Rasio perdesaan sedikit mengalami kenaikan dari 0,273 kondisi Maret 2020 menjadi 0,274 pada September 2020.

<https://riau.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI

Kerangka Sampel Area (KSA) didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), pengindraan jauh, teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan. Pendekatan KSA diharapkan mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional.

1. Sejak 2018, BPS telah bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melakukan penyempurnaan penghitungan luas panen dengan menggunakan metode KSA. KSA ini memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari LAPAN dan digunakan BIG untuk mendelineasi peta lahan baku sawah yang divalidasi dan ditetapkan oleh

Kementerian ATR/BPN untuk mengestimasi luas panen padi.

2. Penyempurnaan dalam berbagai tahapan penghitungan produksi beras telah dilakukan secara komprehensif tidak hanya luas lahan baku sawah saja tetapi juga perbaikan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras. Secara garis besar, tahapan dalam penghitungan produksi beras:

- a. Luas lahan baku sawah nasional yang digunakan mengestimasi luas panen yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/ 2019 tanggal 17 Desember 2019 adalah sebesar 7.463.948 hektar dan luas lahan baku sawah Provinsi Riau sebesar 62.689 hektar.
- b. Pengamatan fase tumbuh padi untuk menghitung luas panen dengan KSA yang dikembangkan bersama BPPT dan telah mendapat pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Produktivitas per hektar berasal dari Survei Ubinan yang telah dilakukan penyempurnaan dengan mengganti metode ubinan berbasis rumah tangga menjadi berbasis sampel KSA.

Angka konversi dari gabah kering panen (GKP) ke gabah kering giling (GKG) dan angka konversi dari GKG ke beras berasal dari Survei Konversi Gabah ke Beras pada tahun 2018 yang merupakan angka konversi yang lebih akurat dengan melakukan survei di dua periode musim yang berbeda dengan basis provinsi sehingga didapatkan angka konversi untuk masing-masing provinsi yang memperhitungkan pengaruh musim.

NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Pengertian Umum:

- NTP merupakan indikator proksi kesejahteraan petani
- NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib)

Arti Angka NTP:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang

konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Kegunaan dan Manfaat

Dari Indeks Harga yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

Dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Cakupan Komoditas

- Subsektor Tanaman Pangan, seperti: padi, palawija
- Subsektor Hortikultura, seperti: sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan

- Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR), seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antardaerah
- Subsektor Peternakan, seperti: ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
- Subsektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

Pengumpulan Data Harga

Dilakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar HKD-1, HKD-2.1, HKD-2.2, HD-1, HD-2, HD-3, HD-4, HD-5.1, HD-5.2, dan HP-6

- Daftar HKD-1 mencatat harga eceran barang kelompok makanan untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.
- Daftar HKD-2.1 mencatat harga eceran barang/jasa kelompok nonmakanan (dalam hal ini untuk jenis konstruksi, jasa, dan transportasi) untuk keperluan konsumsi rumah tangga petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.
- Daftar HKD-2.2 mencatat harga eceran barang kelompok nonmakanan (dalam hal ini adalah jenis aneka perlengkapan rumah tangga dan lainnya) untuk keperluan

konsumsi rumah tangga petani. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.

- Daftar HD-1 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor tanaman pangan (TP). Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
- Daftar HD-2 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor tanaman hortikultura. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
- Daftar HD-3 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor tanaman perkebunan rakyat (TPR). Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.
- Daftar HD-4 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani

dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor peternakan. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.

- Daftar HD-5.1 dan HD-5.2 mencatat harga produsen yang dihasilkan petani dan harga eceran barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian subsektor perikanan tangkap dan budidaya. Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 14 pada bulan yang bersangkutan.

Pemilihan Sampel (Kecamatan)

Dengan rancangan sampling dua tahap, yaitu:

- Tahap pertama, dari setiap provinsi dipilih secara purposif bersyarat, dipilih sejumlah kabupaten yang merupakan daerah sentra produksi pertanian,
- Tahap kedua, dari setiap kabupaten terpilih, dipilih sejumlah kecamatan yang merupakan sentra produksi pertanian.

Pemilihan Pasar

Pemilihan pasar di kecamatan terpilih berdasarkan kriteria:

- Paling besar di kecamatan tersebut

- Beraneka ragam barang yang diperdagangkan
- Kebanyakan masyarakat berbelanja di sana
- Dapat dijamin kelangsungan (kontinuitas) pencatatan harganya

INFLASI

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Sedangkan **Indeks Harga Konsumen (IHK)** adalah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Indeks Harga Konsumen Indonesia dihitung dengan rumus Laspeyres termodifikasi. Dalam penghitungan rata-

rata harga komoditas, ukuran yang digunakan adalah rata-rata aritmetik, tetapi untuk beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, bensin, dan sebagainya digunakan rata-rata geometrik.

Mulai Januari 2020, IHK disajikan dengan menggunakan tahun dasar 2018=100 dan mencakup 90 kota yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kota-kota besar di seluruh Indonesia. IHK sebelumnya menggunakan tahun dasar 2012=100 dan hanya mencakup 82 kota.

Dalam menyusun IHK, data harga konsumen diperoleh dari 90 kota, mencakup antara 248-473 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran yaitu: makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kesehatan; transportasi; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; rekreasi, olahraga, dan budaya; pendidikan; penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Setiap kelompok terdiri dari beberapa subkelompok, dan dalam setiap subkelompok terdapat beberapa komoditas. Lebih jauh, komoditas-komoditas tersebut memiliki beberapa kualitas atau spesifikasi.

Beberapa pasar tradisional, pasar modern, dan outlet di setiap kota dipilih untuk mewakili harga-harga dalam kota

tersebut. Data harga masing-masing komoditi diperoleh melalui wawancara langsung dari 3 atau 4 pedagang eceran, yang didatangi oleh petugas pengumpul data.

Penarikan sampel secara *purposive* digunakan untuk melakukan pemilihan kota, pasar, outlet, responden, komoditas dan kualitas dalam penghitungan IHK (yang paling dominan).

Frekuensi pengumpulan data harga berbeda antara satu komoditas dan komoditas lainnya, tergantung karakteristik masing-masing komoditas, sebagai berikut:

- Pengumpulan data harga beras dilakukan secara harian di Jakarta, dan mingguan di kota-kota lainnya.
- Beberapa komoditas yang termasuk ke dalam kebutuhan pokok, data harga dikumpulkan setiap minggu pada hari Senin dan Selasa.
- Untuk beberapa komoditas bahan makanan, data harga dikumpulkan setiap dua minggu sekali, hari Rabu dan Kamis pada minggu pertama dan ketiga.
- Untuk komoditas bahan makanan lainnya, makanan yang diproses, minuman, rokok dan tembakau, data harga dikumpulkan bulanan pada hari Selasa menjelang pertengahan bulan selama tiga hari (Selasa, Rabu, dan Kamis).
- Data harga untuk barang-barang tahan lama dikumpulkan secara

- bulanan pada hari ke-5 sampai hari ke-15.
- Data harga jasa-jasa dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
 - Data harga sewa rumah dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
 - Upah *baby sitter* dan asisten rumah tangga diamati bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.
 - Data yang berhubungan dengan biaya pendidikan dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10.

EKSPOR-IMPOR

Perdagangan luar negeri terdiri dari ekspor dan impor barang-barang.

Cakupan Komoditas

Semua jenis barang termasuk kecuali yang termasuk di bawah ini:

- a. Pakaian dan perhiasan dari para penumpang.
- b. Barang bawaan penumpang yang digunakan untuk keperluan sendiri, kecuali lemari es, televisi, dsb.
- c. Barang-barang yang diekspor/diimpor dari suatu negara untuk digunakan untuk keperluan kedutaan besar negara tersebut.
- d. Barang-barang yang digunakan untuk keperluan ekspedisi dan pameran.
- e. Barang-barang yang diekspor/diimpor secara langsung oleh angkatan bersenjata.

- f. Peti kemas yang dimaksudkan untuk diisi.
- g. Catatan-catatan dari bank dan keamanan.
- h. Barang-barang contoh.

Sistem Perdagangan

- a. Statistik ekspor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Umum yang meliputi seluruh area geografi Indonesia.
- b. Statistik Impor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Khusus yang meliputi seluruh area geografi Indonesia kecuali Zona Perdagangan Bebas dimana berlaku Perdagangan Luar Negeri.

Penilaian

- a. Ekspor mengacu pada nilai *Free On Board* (FOB).
- b. Impor mengacu pada nilai *Cost Insurance and Freight* (CIF).
- c. Keduanya dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat (USD)

Pengukuran Kuantitas

Semua kuantitas dinyatakan dalam bentuk berat neto dalam satuan kilogram.

Rekan Negara

- a. Negara tujuan adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim.
- b. Negara asal adalah negara dimana barang-barang tersebut diproduksi, setelah diverifikasi oleh Kantor Bea Cukai, sesuai dengan peraturan.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (kategori) yaitu:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Pengadaan Listrik dan Gas
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
- Konstruksi
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Transportasi dan Pergudangan
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Informasi dan Komunikasi
- Jasa Keuangan
- Real Estate
- Jasa Perusahaan
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa Lainnya.

Beberapa kategori di atas ada yang dirinci lagi menjadi subkategori-subkategori.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- pengeluaran konsumsi pemerintah
- pembentukan modal tetap domestik bruto
- perubahan inventori, dan
- ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

PENDUDUK

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

Usia:

Informasi tentang tanggal, bulan, dan tahun dari waktu kelahiran responden menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui umur dari responden. Penghitungan umur harus selalu dibulatkan ke bawah, atau disebut juga umur menurut ulang tahun yang terakhir. Apabila tanggal, bulan, maupun tahun kelahiran seseorang tidak diketahui, pencacah dapat menghubungkan dengan kejadian-kejadian penting baik nasional maupun daerah.

Status Perkawinan:

a. Belum Kawin

Status dari mereka yang pada saat pencacahan belum terikat dalam perkawinan.

b. Kawin

Status dari mereka yang pada saat pencacahan terikat dalam perkawinan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Termasuk di dalamnya mereka yang kawin sah secara hukum (hukum adat, agama, negara, dsb) maupun mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat

sekelilingnya dianggap sebagai suami istri.

c. Cerai Hidup

Status dari mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena bercerai dan belum kawin lagi.

d. Cerai Mati

Status untuk mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena meninggal dunia dan belum kawin lagi.

Anak Lahir Hidup:

Anak Lahir Hidup adalah semua anak yang waktu lahir memeperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis, dan tanda-tanda kehidupan lainnya.

Anak Masih Hidup:

Anak masih hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup yang pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah.

Tempat Lahir:

Tempat lahir responden adalah provinsi tempat tinggal ibu kandungnya pada saat melahirkannya.

Cara Pengumpulan Data Penduduk:

a. Sensus Penduduk

Berdasarkan peraturan perundangan (UU No. 6 Tahun 1960; UU No. 7 Tahun 1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan

pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel.

Pendekatan *de jure* dan *de facto* diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de jure*, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

b. Survei Penduduk Antar Sensus

Survei penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih di wawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

c. Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

Sama dengan survei penduduk antar sensus, survei ini menghasilkan ukuran demografi, khususnya fertilitas, keluarga berencana, dan mortalitas. Rumah tangga terpilih diwawancara untuk tujuan ini.

d. Registrasi Penduduk

Data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan

administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan ke dalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas ini (dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri) menggunakan pendekatan *de jure*.

TENAGA KERJA

Konsep/Penjelasan Teknis

- 1. Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
- 2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- 3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- 4. Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

5. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya.

Contoh:

- a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/ peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
- b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).
- c. Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan, dan sebagainya, seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial, dan sebagainya

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada "*An ILO Manual on Concepts and Methods*")

- **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:

- a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
- c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

- **Mempersiapkan suatu usaha** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/ pekerjaan yang "**baru**" bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "**tindakannya nyata**", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.
- Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan:

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

a. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

b. Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:

a. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya

memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah

atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.

- f. Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- g. Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).

h. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:

- a. Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.
- b. Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar. Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar.

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia?

- IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Apa Saja Manfaat IPM?

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Mengapa Metodologi IPM Diubah?

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM.

PERTAMA

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
- PDRB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

KEDUA, penggunaan rumus rata-rata aritmetik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Apa Saja yang Berubah?

Indikator

- Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
- Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Metode Penghitungan

Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmetik menjadi rata-rata geometrik.

Apa Keunggulan IPM Metode Baru?

Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).

- Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

KEMISKINAN

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Daerah tertinggal (atau kabupaten tertinggal) adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Daerah/kabupaten tertinggal ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perekonomian masyarakat
2. Sumber daya manusia
3. Sarana dan prasarana
4. Kemampuan keuangan daerah
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik daerah

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis kemiskinan makanan

GKNM = Garis Kemiskinan non makanan

Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia maka dipakai pendekatan data konsumsi/pengeluaran. Termasuk pengeluaran adalah perkiraan barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.

Garis kemiskinan dihitung sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata tertimbang harga kalori yang diperlukan dari 52 komoditas makanan,
2. Mengalikan harga tersebut dengan 2100 yang merupakan batas kemiskinan makanan per kapita per hari,
3. Menghitung nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan,
4. Menghitung proporsi penduduk miskin dengan cara membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk (dinyatakan dalam persentase).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, K.B. 2020. *Strategi Petani Menghadapi Pandemi Covid-19*.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/308928-strategi-pertanian-menghadapi-pandemi-COVID-19>. Diakses pada Tanggal 30 April 2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2020. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Riau Agustus 2020*. Berita Resmi Statistik No.49/11/14/Th. XXIII, 5 November 2020. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2021. *Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Riau*. Berita Resmi Statistik No. 06/01/14/Th.XXII. 21 Januari 2021. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2021. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau Tahun 2020*. Berita Resmi Statistik No. 04/01/14/Th.XXII. 4 Januari 2021. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2021. *Luas Panen dan Produksi Padi di Riau 2020 (Angka Tetap)*. Berita Resmi Statistik No.17/03/14/Th. XXII, 1 Maret 2021. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2021. *Perkembangan Ekspor dan Impor Provinsi Riau Desember 2020*. Berita Resmi Statistik No. 09/02/14/Th.XXII. 1 Februari 2021. Pekanbaru: BPS.
- _____. 2021. *Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan IV-2020*. Berita Resmi Statistik No. 11/02/14/Th.XXII. 5 Februari 2021. Pekanbaru: BPS.
- bisnis.com. 2021. *Impor Bahan Baku Kembali Terkontraksi, Manufaktur Belum Pedes?*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201116/12/1318305/imp-or-bahan-baku-kembali-terkontraksi-manufaktur-belum-pede>. Diakses tanggal 2 Februari 2021.
- bps.go.id. *NTP 2020*. <https://riau.bps.go.id/indicator/22/33/2/ntp.html>. Diakses tanggal 26 Januari 2021.
- _____. *Inflasi (Persen), 2020*. <https://riau.bps.go.id/indicator/3/1/2/inflasi.html>. Diakses tanggal 26 Januari 2021.
- _____. *Ekspor (Milyar US\$), 2020*. <https://riau.bps.go.id/indicator/8/36/1/ekspor.html>. Diakses tanggal 26 Januari 2021.
- _____. *Impor (Juta US\$), 2020*. <https://riau.bps.go.id/indicator/8/39/2/imp-or.html>. Diakses tanggal 26 Januari 2021.
- Burhanuddin, C.I. & Abdi. M.N. 2020. *Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19)*. Jurnal Ilmiah AkMen. 17 (1): 710-718.
- Dwi, H. J. 2020. *Momentum Pertumbuhan Sektor Pertanian Akibat Pandemi*.
<https://katadata.co.id/muhammadrighoi/analisisdata/5fb4accc40b8b/moment-um-pertumbuhan-sektor-pertanian-akibat-pandemi>. Diakses tanggal 28 Januari 2021.

- ECLAC, & ILO. (2020). *La Pandemia Por El COVID-19 Podría Incrementar El Trabajo Infantil En América Latina Y El Caribe*. Technical Note No.1, Santiago, Chile (dalam <https://www.latinamerica.undp.org>. UNICEF and UNDP Report Reveals The Impact of the Pandemic on Education). Diakses tanggal 27 Januari 2021.
- Fajar, B.H. & Akita, A.V. 2020. *Kebijakan Pangan di Masa Pandemi COVID-19*. CSIS Commentaries DMRU-048-ID.
- indonesia-investments.com. 2021. *Minyak Kelapa Sawit*. <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?>. Diakses tanggal 26 Januari 2021.
- indopremier.com. 2020. *Covid-19 Picu Perubahan Besar pada Struktur Tenaga Kerja Nasional*.https://indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Covid_19_Picu_Perubahan_Besar_Pada_Struktur_Tenaga_Kerja_Nasional&news_id=126366&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=,&halaman=1. Diakses tanggal 12 Februari 2021.
- infopublik.id. 2021. *Meski Pandemi Covid-19, Inflasi di Riau 2020 Masih Terkendali*. <http://infopublik.id/kategori/nusantara/496315/meski-pandemi-covid-19-inflasi-di-riau-2020-masih-terkendali>. Diakses tanggal 25 Januari 2021.
- Kementerian Pertanian. 2020. *Dampak COVID-19 Terhadap Sektor Pertanian*. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Buletin Perencanaan Pembangunan Pertanian Vol 1 No.2/ 2020 (April).
- Muliati, N. K. 2020. *Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2010 (Covid-19)*. Jurnal Widya Akuntansi dan Keuangan. 2(2): 78-86.
- Nugroho, S. & Pitoyo, A. J. 2017. *Arus Migrasi Risen di Indonesia Tahun 1980-2020*. Jurnal Bumi Indonesia Vol. 6 No.4.
- republika.co.id. 2021. *Anomali Inflasi Tahun Ini Akibat Terus Melemahnya Daya Beli*. <https://republika.co.id/berita/qehh4l409/anomali-inflasi-tahun-ini-akibat-terus-melemahnya-daya-beli>. Diakses tanggal 25 Januari 2021.
- riaupos.jawapos.com. 2021. *Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi*. <https://riaupos.jawapos.com/feature/28/12/2020/243734/mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonomi.html>. Diakses tanggal 25 Januari 2021.
- Risalah Sektor ILO. 2020. *Covid-19 dan Dampaknya Pada Pertanian dan Ketahanan Pangan*. International Labour Organization: Departemen Kebijakan Sektor.



Rivani, E. 2020. *Surplus Neraca Perdagangan dan Harapan Pemulihan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19*. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol.XII:20. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

UNICEF. 2020. *COVID-19: Are Children Able to Continue Learning during School Closures?* UNICEF: New York. NY. USA.

weforum.org. 2021. *United Nations Social Economic Recovery Framework*. <https://www.weforum.org/agenda/2020/06/united-nations-social-economic-recovery-framework/> Diakses tanggal 27 Januari 2021.

<https://riau.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://riau.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No.12 Pekanbaru 28131
Telp : (0761) 23042, Fax : (0761) 21336
Homepage : <http://www.riau.bps.go.id> E-mail : bps1400@bps.go.id

ISBN 978-602-5665-44-8



9 786025 665448